

Inovasi Peternakan di Cina Bone, Inseminasi Buatan Dikuatkan dengan Ketersediaan Pakan



Sumber gambar:

<https://sulselprov.go.id/post/inovasi-peternakan-di-cina-bone-inseminasi-buatan-dikuatkan-dengan-ketersediaan-pakan>

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, telah mengambil langkah progresif dengan melaksanakan program Inseminasi Buatan (IB) di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Program ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan populasi ternak, khususnya sapi Bali dan Simental, yang merupakan dua jenis sapi utama di desa tersebut.

Pada Jumat, 19 April 2024 ia berkunjung dan melakukan inseminasi buatan di Desa Kanco. Inseminasi buatan yang dilakukan antara indukan simental dan bibit limosine ini diharapkan dapat menghasilkan keturunan dengan kualitas genetik yang lebih baik.

Pelaksana IB di desa ini, Syamsir menyatakan optimisme bahwa bantuan provinsi dalam penyediaan strow (bibit) akan memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas ternak di Desa Kanco. "Ini strow (benih) dari provinsi. Mudah-mudahan di provinsi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat," sebutnya.

Adapun Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulawesi Selatan, Nurlina Saking, menambahkan bahwa Desa Kanco memiliki populasi sapi betina sebanyak 1.200 dari total 17.000 di Kecamatan Cina. "Program pelayanan kesehatan hewan, termasuk vaksinasi penyakit mulut dan kuku,

serta pelaksanaan inseminasi buatan di sini berjalan dengan cukup baik," ujar Nurlina.

Selain itu, Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin menekankan pentingnya dukungan pengetahuan dan pelatihan dalam menyediakan pakan yang berkualitas untuk ternak. Dia meminta Dinas Peternakan Sulsel untuk segera menyelenggarakan pelatihan pembuatan pakan ternak, mengingat bahan-bahan pakan yang melimpah namun belum termanfaatkan secara maksimal. "Bu Kadis berikan pelatihan secepatnya untuk memanfaatkan potensi pakan yang ada, agar program ketahanan pangan ini dapat berjalan dengan sukses," kata Bahtiar Baharuddin, menanggapi masukan dari peternak dan penyuluh peternakan.

Program inseminasi buatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan populasi ternak, tetapi juga menjadi pilar penting dalam upaya peningkatan ketahanan pangan di Sulawesi Selatan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggalakkan Gerakan Selamatkan Pangan atau Gerakan Stop Boros Pangan. Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel Andi Muhammad Arsjad dalam keterangannya di Makassar, Kamis, mengatakan kunjungan Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional RI Nita Yulianis di daerah itu pada Rabu (3/4) sebagai bentuk komitmen menyukseskan gerakan tersebut.

"Kita berharap kunjungan Bapanas menginspirasi, memotivasi kita semua bahwa ketahanan pangan itu bukan hanya ketersediaan dan keterjangkauan, tapi bagaimana kita memanfaatkan pangan itu secara bijak," ucap Arsjad.

Pj Sekda Sulsel yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel ini mengatakan Gerakan Stop Boros Pangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyelamatkan pangan. Tidak hanya itu, lanjutnya, gerakan ini juga menjadi bagian dari upaya untuk mengajarkan masyarakat bersikap lebih bijak dalam mengkonsumsi dan membeli makanan.

Ia menjelaskan bisa bayangkan kalau selama ini masyarakat kita sudah terbiasa dengan berbagai acara, berbagai kegiatan mengkonsumsi makanan secara berlebihan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan tapi apa yang diinginkan. "Sehingga sisa-sisa makanan itu terbuang begitu saja dan ini juga berdampak pada lingkungan," ujarnya.

Sementara itu, Nita Yulianis mengungkapkan pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan Ramadhan Ceria Pangan ini sebagai upaya dalam

menggapai berkah Ramadhan dengan berbagi pangan dan sekaligus menyuarkan upaya Gerakan Selamatkan Pangan.

Ia mengatakan Sulsel merupakan satu dari 15 provinsi di Indonesia yang melaksanakan Gerakan Selamatkan Pangan yang tujuannya untuk terus mendorong dan mengencarkan pencegahan dan pengurangan Food Loss and Waste (FLW) yang menjadi komitmen pemerintah Indonesia menuju transformasi sistem pangan yang berkelanjutan.

Nita menambahkan apresiasi Bapanas terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga karena adanya keterlibatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulsel bersama tokoh-tokoh agama dan masyarakat serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sulsel dalam upaya Gerakan Selamatkan Pangan. "Kami juga berkunjung ke Baznas. Insya Allah Baznas di Sulawesi Selatan menjadi inovasi juga, karena di tingkat nasional, Baznas Sulawesi Selatan yang pertama bekerja sama untuk upaya Gerakan Selamatkan Pangan, sukses untuk Sulawesi Selatan," tutupnya

Sumber Berita :

1. <https://www.antaranews.com/berita/4043754/pemprov-sulsel-dan-bapanas-ri-galakkan-gerakan-selamatkan-pangan> 4 April 2024.
2. <https://sulselprov.go.id/post/inovasi-peternakan-di-cina-bone-inseminasi-buatan-dikuatkan-dengan-ketersediaan-pakan> 20 April 2024.

Catatan :

1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 47 yang menyatakan:
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - c. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- d. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - 1) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - 2) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - f. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
 - g. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
 - h. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
 - i. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
 - j. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
2. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.

